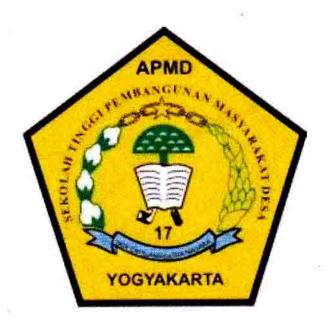
SKRIPSI

STRATEGI PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MENGEMBANGKAN INDUSTRI KECIL MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

(STUDI DESKRIPTIF-KUALITATIF)



Disusun Oleh

IRWAN UADI NIM: 11520193

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa" APMD" Yogyakarta, pada:

Hari

: Jumat

Tanggal

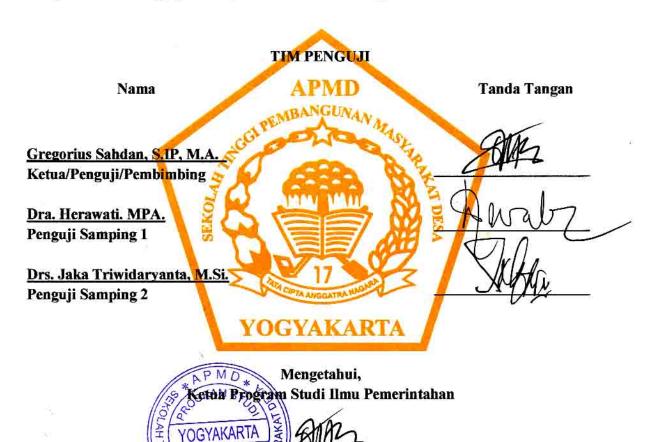
: 13 Maret 2016

Waktu

: 14.00 WIB

Tempat

: Ruang Ujian Skripsi STPMD"APMD"Yogyakarta



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD" YOGYAKARTA 2016

MOTTO

"Si Tou Timou Tumou Tou- Manusia dapat disebut sebagai manusia , jika sudah memanusiakan manusia lainnya" (Dr. Sam Ratoelangi)

"Jika mempunyai keinginan yang kuat dari dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu membahu mewujudkannya" (Ir. Soekarno)

"Melawan diri sendiri adalah sesuatu yang sangat melelahkan" (Imam Sutrisno Suhardi"

"Menjadi manusia yang berkualitas tidak terlepas dari sebuah perjuangan dan pengalaman serta kekuatan pengetahuan yang dimiliki" (Irwan Uadi)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya kecil ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku Bapak Warsi Uadi dan Ibu Farida Manulit serta adik saya Rizal Uadi yang telah memberikan kasih sayang serta segala dukungannya baik materil maupun non materil yang tidak mungkin dapat terbalaskan hanya dengan selembar kertas ini.

Teruntuk engkau yang kian mempesona. Mengalahkan mentari pagi yang hendak menampakkan dirinya di ufuk timur. Datanglah mengisi jiwa yang sepi.

Kata Pengantar

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : "Strategi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengembangkan Industri Kecil Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)".

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi sebahagian syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dengan terselesaikannya skripsi ini melibatkan banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dengan tidak mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

- 1. Ketua STPMD" APMD" Yogyakarta, Bapak Habib Muhsin, Sos., M.Si, beserta pimpinan lain (Wakil Ketua I, Wakil Ketua II, dan Wakil Ketua III).
- 2. Kepada Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan dan tak lupa dosen pembimbing penulis, Bapak Gregorius Sahdan, S.IP., M.A. yang membimbing dan memberikan motivasi sampai terselesaikannya skripsi ini.
- 3. Kepada Bapak Drs. Jaka Triwidaryanta, M.Si dan Ibu Dra. Herawati, MPA selaku dosen penguji skripsi ini.
- 4. Kepada Bapak/Ibu Dosen STPMD" Yogyakarta yang telah berkewajiban untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya semasa perkuliahan.
- 5. Kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta (khususnya bidang perekonomian) dan DIPERINDAG Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan informasi data dan waktu senggangnya kepada peneliti.
- 6. Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khusunya Sekretariat Daerah yang telah memberikan ijin penelitian.
- 7. Kepada mas Imam, Wahyu, Anan, Yanto, bang Susanto Polamolo, selaku kawan, sahabat serta keluarga yang selalu menginspirasi, mendidik dan memberi pengetahuannya.

- 8. Kepada Uldan Tajri dan Lidia (pasangan yang aneh) serta mbah Khurotul Aini Chintya Putri Marhaennesya yang selalu cerewet dari kejauhan (Riau).
- 9. Kepada Kedai Kopi AnYos beserta pelanggan setianya dan para sahabat di Pergerakan Kebangsaan yang selalu berbagi pengetahuan yang luas.
- 10. Kepada Angkringan Dowo, Pak Lurah (Abell) beserta pelanggan setianya.
- 11. Kepada Bung-Bung dan Sarinah seperjuangan di Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Khususnya Komisariat STPMD"APMD" Yogyakarta.
- 12. Kepada Rumah Atas, mas Jack, mba Retno dan Mas Gendra serta anak kos Balirejo, Doni, Ijal, Ikar, Yanto, Lidia, Feby, Risti dan yang sering mampir di kos Recehan.
- 13. Kepada teman-teman KKN dan pak Dukuh di pedukuhan Soka Kulonprogo.
- 14. Kepada teman-teman angkatan 2011 STPMD"APMD" Yogyakarta.
- 15. Kepada Teater Gerhana, Komunitas NAMA UIN SUKA, Teater BANYU Wonosobo, Teater AHAD.

Semoga karya kecil ini dapat berguna bagi banyak pihak. Dan semoga pihak yang terlibat dalam karya ini mendapat Anugerah dari Sang Maha Pencipta.

Yogyakarta, 26 April 2015 Penyusun

Irwan Uadi

DAFTAR ISI

HALAMAN COVERi
LEMBAR PENGESAHANii
HALAMAN PERNYATAANiii
MOTTOiv
HALAMAN PERSEMBAHANv
KATA PENGANTARvi
ABSRTAKSIviii
DAFTAR ISIix
DAFTAR TABELxi
BAB 1 PENDAHULUAN
A. LatarBelakang1
B. RumusanMasalah
C. TujuanPenelitian
D. ManfaatPenelitian
E. KerangkaTeori
E.1. PengertianStrategi
E.2. PengertianIndustri
E.3. MasyarakatEkonomi ASEAN21
F. RuangLingkupPenelitian23
G. MetodePenelitian
BAB II PROFIL WILAYAH PENELITIAN, PERTUMBUHAN EKONOMI DAN
PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
A. Profil Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
A.1. KondisiGeografis

	A.2. KondisiDemografis	30
	A.3. Pemerintahan	32
	A.4. SosialBudaya	37
B.	PertumbuhanEkonomi Daerah Istimewa Yogyakarta	40
C.	PerkembanganIndustri Kecil Daerah Istimewa Yogyakarta	43
DALA		
	NOMI ASEAN	
	KarakteristikInforman	
B.	HasildanPembahasan	48
	B.1. VisidanStrategiPemerintah Daerah	Istimewa
	YogyakartadalamPengembanganIndustri Kecil	49
	B.2. PeranIndustri Kecil BagiEkonomidanStrategiPengembangannya di I	Daerah Istimewa
	Yogyakarta	54
	B.3. KesiapanPelakuIndustri Kecil dalamMenghadapiMasyarakatEkonon	niASEAN61
BAB 1	IV PENUTUP	
A.	Kesimpulan	68
B.	Saran	72

DAFTAR PUSTAKA INTERVIEW GUIDE LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I. 1.Kriteria UKM Menurut Asset dan Omzet
Tabel II. 1. Luas Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2013
Tabel II. 2. Jumlah Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/KotaTahun 2013
Tabel II. 3. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Tingkat Pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013
Tabel II.4. Jumlah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 201334
Tabel II.5. Jumlah Kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013
Tabel II.6. Jumlah Kelurahan/Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013
Tabel II.7. Jumlah Sekolah dan Perguruan Tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 201338
Tabel II. 8. Perkembangan Industri Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta 201444
Tabel III. 1. Pejabat Instansi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM (DISPERINDAGKOP dan UKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016
Tabel III. 2. Pelaku Industri Kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta 2016
Tabel III. 3. Perkembangan Unit Usaha dan Serapan Tenaga Kerja Industri Kecildalam Kurun Waktu 2010-2013
Tabel III. 4. Rencana Kegiatan dan Sketsa Implementasi di Daerah Istimewa Yogyakarta 201559

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

ASEAN Economic Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) merupakan bentuk dari kesepakatan beberapa Negara pada *Declaration of Concord II* tanggal 7 Oktober 2003 di Bali. Masyarakat Ekonomi yang menjanjikan masa depan yang lebih baik diperekonomian ASEAN ini sepenuhnya baru akan terbentuk pada tahun 2020 namun dipercepat menjadi tahun 2015. Selain itu juga, pembentukan MEA merupakan salah satu pilar utama dari 3 pilar integrasi negara-negara ASEAN. Dua pilar lainnya, yakni ASEAN Security Community (ASC), dan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Tujuan dibentuknya MEA adalah untuk meningkatkan stabilitas perekonomian di kawasan ASEAN dan kawasan ekonomi antar negara yang kuat. Dengan keadaan Amerika dan Eropa yang masih mengalami perlambatan di sektor perekonomian, harapan dari terbentuknya komunitas tersebut dapat mengatasi masalah-masalah perekonomian antar negara ASEAN.

Selain pembentukan MEA, khususnya di bidang ekonomi, dilanjutkan pula dengan penandatanganan ASEAN Charter/Piagam ASEAN sebagai "payung hukum" yang menjadi basis komitmen dalam meningkatkan dan mendorong kerjasama antar Negara-negara Anggota ASEAN, dan beserta cetak biru MEA 2015 pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura, pada tanggal 20 November 2007. Penandatanganan Piagam ASEAN beserta cetak biru MEA adalah merupakan babak baru dalam kerjasama ASEAN di

bidang ekonomi diusianya yang ke empat puluh tahun. Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa MEA adalah merupakan salah satu dari tiga pilar utama dalam ASEAN Community 2015, yang ingin membentuk integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

MEA memiliki 5 pilar utama yaitu :

- 1. Aliran bebas barang (free flow of good),
- 2. Aliran bebas jasa (free flow of sevice),
- 3. Aliran bebas investasi (free *flow of investment*),
- 4. Aliran bebas tenaga kerja terampil (free flow of skilled labour),
- 5. Aliran bebas modal (free flow of capital)

Kesepakatan yang akan mulai diterapkan pada akhir tahun 2015 ini, nantinya memungkinkan satu negara menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara sehingga kompetisi akan semakin ketat. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja professional seperti dokter, pengacara, akuntan dan lainnya. MEA mensyaratkan adanya penghapusan aturan-aturan yang sebelumnya menghalangi perekrutan tenaga kerja asing, pembatasan ini terutama dalam sektor tenaga kerja professional yang didorong untuk dihapuskan. Sehingga membuat semuanya mengalir dengan bebas dan lancar tanpa mengenal batas-batas negara anggotanya.

Maksud dari terbentuknya Masyarakat Ekonomi ASEAN adalah:

 Menciptakan kawasan Asia Tenggara yang stabil, makmur dan berdaya saing kuat,

- Memperlancar aliran barang dan jasa serta modal dan tenaga kerja agar bergerak lebih bebas,
- Pengembangan kondisi ekonomi yang lebih berimbang di kawasan Asia Tenggara,
- 4. Pengurangan kemiskinan dan perbedaan status sosial ekonomi di ASEAN,
- 5. Memperdalam integrasi ekonomi di kawasan ASEAN,
- 6. Meningkatkan iklim investasi sehingga menjadi kondusif,
- Memperkuat perekonomian ASEAN yang dengan demikian akan membuat ASEAN lebih dipertimbangkan dalam forum Internasioanal dan menjadi kawasan yang disenggani di dunia.

Dalam kalimat lain Masyarakat Ekonomi ASEAN merupakan bentuk liberalisasi dan perluasan pangsa pasar atas barang dan jasa yang diproduksi oleh Negara-negara Asia Tenggara. Oleh karenanya dapat dipastikan, ke depan faktor yang berpengaruh paling signifikan pada dinamika perdagangan dan ekonomi di Negara-negara ASEAN adalah kualitas dan daya saing produk maupun jasa. Negara dengan kualitas produk dan sumber daya manusia yang tinggi berpeluang besar menguasai pasar ASEAN.

Dengan berpijak pada kewajiban negara untuk memajukan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD 1945, kebijakan pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam menghadapi MEA sudah seharusnya berorientasi pula pada peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia seluruhnya tanpa terkecuali. Sebagai pengampu kebijakan tertinggi dalam bidang industri, Kementerian Perindustrian Republik Indonesia telah menyampaikan bahwa ada dua pilihan strategi yang akan digunakan dalam menghadapi pasar bebas ASEAN ini. Dua strategi tersebut adalah

strategi ofensif dan strategi defensif. Strategi ofensif dimaknai sebagai strategi yang dipersiapkan untuk meningkatkan daya saing, mutu dan kualitas produksi kegiatan industri di Indonesia sehingga dapat menguasai pangsa pasar 650 juta jiwa di kawasan ASEAN. Sedangkan strategi defensif bertujuan untuk melakukan langkah antisipatif untuk mengurangi risiko dari dampak negatif pemberlakuan pasar bebas ASEAN tersebut.

Adalah jamak terjadi ketika isu-isu yang bersifat makro seringkali meninggalkan pembahasan bersifat mikro yang justru melekat dengan kehidupan masyarakat seharihari. Implementasi dari strategi ofensif maupun defensif seperti yang diwacanakan di atas tadi tentu saja akan lebih mudah dilaksanakan pada industri-industri dengan skala besar yang lebih stabil secara permodalan. Namun bagaimana dengan industri-industri kecil, misalnya pengrajin sepatu kulit di Manding, Bantul atau industi olahan manisan wortel di kaki Gunung Lawu dalam menghadapi MEA ini? Akankah pilihan kebijakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah tadi berpihak pada mereka?

Peran pemerintah daerah dalam hal penyusunan kebijakan dan penerapan strategi yang mampu mengoptimalkan produksi industri kecil sekaligus melindunginya dari tabiat pasar bebas yang kejam terhadap mereka yang tak berpunya sangatlah vital. Bagaimanapun, era otonomi daerah yang bertujuan untuk menciptakan *good governace* membuka pintu selebar-lebarnya bagi pemerintah daerah untuk terus berinovasi sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang memiliki anomali pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Pada

saat pertumbuhan ekonomi nasional mengalami perlambatan, justru Yogyakarta mengalami kondisi sebaliknya. Berturut-turut sejak tahun 2009 hingga 2013, pertumbuhan eokonomi Yogyakarta naik dari 4.39 hingga 5.40. Pun demikian halnya dengan pendapatan per kapita daerah Yogyakarta yang mengalami kenaikan dari 5,855,379 pada tahun 2009 menjadi 6,940,000 pada tahun 2013. Salah satu faktor yang diasumsikan menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Yogyakarta tersebut adalah bertambahnya komposisi industri kecil yang tumbuh di daerah. Menurut data yang dilansir oleh BPS pada tahun 2010, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang berbasis di wilayah perdesaan mampu menyerap 91% dari total tenaga kerja di wilayah Yogyakarta.

Sehubungan dengan kontribusi UMKM tersebut, maka pemberdayaan dan pengembangan UMKM menjadi hal yang perlu dilakukan secara berkesinambungan. Bagaimanakah strategi pengembangan UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang seharusnya dilakukan? Jawaban dari pertanyaan tersebut menjadi fokus penelitian ini. Untuk menjawab, perlu ditelusuri terlebih dahulu berbagai masalah yang dihadapi oleh UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Demikian pula perlu dilihat strategi survival yang telah dilakukan oleh UMKM agar tetap mampu bertahan menjalankan usahanya.

Masalah dan Kinerja UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sri Susilo dan Sutarta (2004) melakukan kajian masalah dan dinamika industri kecil pascakrisis ekonomi pada tahun 1998 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Besar sampel mencakup 200 unit usaha yang mencakup industri pengolahan makanan, industri kerajinan kulit, industri gerabah, dan industri kerajinan lainnya. Metode pengumpulan

data dilakukan dengan survei lapangan, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD). Permasalahan yang dihadapi industri kecil antar kelompok industri mempunyai persamaan dan perbedaan. Persamaan yang menonjol adalah kenaikan harga faktor produksi yang memaksa mereka menaikkan harga jual produk. Masalah yang lain adalah menurunnya tingkat produksi dan employment.

Dalam hal perbedaan masalah yang dihadapi tergantung dari jenis dan karaketristik industri kecil. Ada yang menyatakan masalah pokok yang dihadapi adalah kemampuan bersaing di pasar, pemasaran produk, dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Dalam hal dinamika usaha, persamaan di antara mereka terutama dalam diversifikasi produk. Pengusaha industri kecil melakukan diversifikasi dari sisi bahan baku dan hasil produksi. Perbedaan dinamika usaha terjadi dalam hal diversifikasi usaha. Pengusaha industri kecil melakukan diversifikasi usaha yang berbeda sama sekali dengan usaha sebelumnya, namun juga ada yang melakukan diversifikasi usaha yang terkait dengan usaha sebelumnya.

Selanjutnya Sri Susilo (2007) melakukan studi mengenai masalah dan dinamika usaha kecil dengan fokus pedagang klithikan di alun-alun selatan Kota Yogyakarta. Survei dilakukan terhadap 40 pedagang klithikan. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawan-cara mendalam. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Masalah yang dihadapi oleh pedagang klithikan terutama dalam hal: (1) Lokasi usaha; (2) Perijinan; (3) Modal usaha; (4) Kondisi cuaca; dan (5) Pasokan barang dagangan. Dinamika usaha yang dialami oleh pedagang klithikan relatif statis atau sulit untuk berkembang. Hal ini terjadi karena keterbatasan yang ada pada pedagang terutama dalam hal modal dan lokasi usaha.

Kemudian Sri Susilo et al., (2008) melakukan kajian masalah dan kinerja industri kecil pasca gempa di Kabupaten Bantul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Survei dilakukan terhadap 100 pengusaha yang tergolong industri skala kecil dan menengah (IKM). Periode survei dilakukan 6-7 bulan setelah terjadinya gempa 17 Mei 2006. Jenis IKM mencakup industri gerabah dan keramik, industri kerupuk kulit, industri makanan tahu, industri genteng, dan industri kerajinan kulit. Pengumpulan data dilakukan dengan survei lapangan, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD). Analisis data dilakukan secara deskriptif. Masalah utama yang dihadapi oleh pengusaha pasca gempa adalah ketidakmampuan memenuhi kewajiban finansial terhadap pihak lain dan keterbatasan untuk menambah modal. Masalah lain yang dihadapi adalah menurunnya hasil produksi dan pemasaran hasil produksi. Bagaimana dengan kinerja usahanya? Dengan indikator kinerja tingkat produksi maka sebagian besar unit usaha (65 persen) mengalami penurunan, sedangkan 23 persen produksinya tetap, dan sebanyak 12 persen mengalami penurunan.

Tarigan dan Sri Susilo (2008) melakukan kajian masalah dan kinerja industri kecil pasca gempa untuk kasus industri kerajinan perak di Kota Yogyakarta. Survei dilakukan terhadap 50 pengrajin perak dan pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara mendalam. Kegiatan survei lapangan dilakukan pada bulan Desember tahun 2006 atau 7 bulan setelah gempa 27 Mei 2006. Kesimpulan dari riset sebagai berikut: (1) Pengusaha/pengrajin perak menghadapi permasalahan yang terkait dengan terganggunya kegiatan produksi karena adanya kerusakan bangunan serta prasarana produksi; (2) Terganggunya proses produksi menyebabkan berkurangnya jumlah produksi yang berimplikasi pada kemampuan melayani permintaan; (3) Penurunan permintaan pada

gilirannya akan mengurangi pendapatan dan berimplikasi pada kemampuan memenuhi kewajiban finansial. Dari aspek kinerja, gempa bumi menyebabkan: (1) Terjadinya ratarata penurunan jumlah produksi sebesar 43,46 persen; (2) Rata-rata penurunan nilai penjualan sebesar 26 persen.

Strategi Survival UMKM di Provinsi Daerah Iistimewa Yogyakarta. Berikut kajian yang terkait dengan strategi survival atau bertahan UMKM di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menghadapi kondisi lingkungan usaha yang berubah. Sri Susilo (2005) melakukan kajian strategi usaha mikro-kecil dengan kasus pedagang warung angkringan di Kota Yogyakarta. Survei dilakukan pada bulan Maret-April 2005 terhadap 50 pedagang warung angkringan. Pengumpulan data dilakukan dengan survei dan wawancara mendalam. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif. Strategi atau tindakan yang dilakukan oleh pedagang warung angkringan agar tetap mampu bertahan dalam menjalan usahanya adalah: (1) Melakukan diversifikasi barang dagangan dan diversifikasi usaha. (2) Mentaati peraturan atau imbauan yang diberikan pihak kecamatan/ kelurahan dan menjaga hubungan baik dengan pihak lain (masyarakat sekitar dan pemasok/ juragan) agar tetap dapat berjualan di lokasi usaha saat ini, serta ikut menjaga ketertiban dan kebersihan di sekitar lokasi usaha. (3) Mencoba untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan, misalnya perubahan harga, yang mempengaruhi usahanya. (4) Melayani pembeli atau pelanggan dengan baik, termasuk memberikan kesempatan menunda pembayaran.

Selanjutnya Sri Susilo dan Krisnadewara (2007) melakukan riset strategi bertahan industri pasca gempa di Yogyakarta. Sampel merupakan pengusaha atau pengrajin skala kecil. Survei mencakup industri gerabah dan keramik, industri makanan tahu, industri

genteng, industri kulit, industri kerajinan perak, industri kerupuk kulit, dan industri kerajinan patung/souvenir. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner dan wawancara mendalam. Strategi yang diterapkan adalah: (1) Berproduksi dengan fasilitas/peralatan terbatas. (2) Berproduksi dengan jumlah bahan baku terbatas. (3) Berproduksi dengan jumlah tenaga kerja terbatas. (4) Berproduksi dengan modal finansial terbatas. (5) Membuka shoow-room/ outlet. (6) Melakukan usaha sampingan. Dalam kasus pengusaha/pengrajin dalam riset ini masalah yang terjadi lebih dari sisi penawaran dari pada sisi permintaan. Oleh karena itu yang lebih penting adalah upaya percepatan pemulihan kembali (recovery) dari usaha, dan hal tersebut diawali dengan melakukan kegiatan produksi. Bagi pengusaha/pengrajin korban gempa, suntikan berupa bantuan modal menjadi sangat berarti. Dengan tambahan modal maka berbagai keterbatasan dalam kegiatan produksi dapat dikurangi/ditekan, sehingga aktivitas produksi akan lebih lancar, dan pada gilirannya pasar dapat dilayani dengan baik.

UMKM di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta didominasi oleh sektor perdagangan dan pertanian. Di sisi lain, dominasi UMKM di sektor perdagangan tersebut tidak dapat dipisahkan dengan keberadaan sektor pariwisata. Keindahan alam dan ciri khas kebudayaan Jawa yang masih terjaga hingga kini merupakan magnet penarik minat pelancong domestik maupun manca. Hal ini kemudian dimanfaatkan secara cerdik oleh pengusaha kecil di sektor kerajinan untuk memasarkan produknya. Inovasi-inovasi akan produk yang mereka hasilkan seakan tidak pernah berhenti.

Menjadi menarik kemudian untuk melihat bagaimana relasi yang terbangun di antara pemerintah daerah DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA dengan para pelaku

usaha melalui pilihan strategi pengembangan industri kecil dalam menghadapi MEA. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas hal tersebut. Agar lebih tersistematis maka penulis mencoba membahasnya dalam skripsi yang berjudul "Strategi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Mengembangkan Industri Kecil Menghadapi MEA (Studi Deskriptif Kualitatif)"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang penulis buat sebagai berikut: "Bagaimana strategi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam mengembangkan industri kecil menghadapi MEA?"

C. Tujuan Penelitian

Daftar Pustaka

Dawam, M. Rahardjo. 2014. Ekonomi Politik Pembangunan: Fadli Zon Library. Jakarta.

Joesoef Daoed.2014. Studi Strategi, Logika Ketahanan dan Pembangunan Nasional. Jakarta: Penerbit Buku Kompas

Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2015; Menuju Asean Economic Community, Jakarta.

Esmara, Hendra (Ed), 1987; Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan, Jakarta: PT Gramedia.

Kementerian PPN/Bappenas, 2014; *Persiapan Daerah dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN*, Jakarta: Pustaka Virtual Tata Ruang dan Pertanahan (Pusvir TRP).

Moleong Lexy J. 2001. Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Karya, Bandung.

Winarno, Budi, 2005; Kebijakan Publik, Teori dan Proses, Yogyakarta: Media Presindo.

Dokumen Peraturan-Peraturan:

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Rancangan Kerja Perencanaan Daerah (RKPD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2015.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005–2025.

ProdukUnggulan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014. Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2014,Badan Pusat Statistik DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Statistik Keuangan Daerah (*Regional Financial Statistics*) Daerah Istimewa Yogyakarta 2013-2014, BPS DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian Tahun 2015, BAPPEDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

Rencana Program Kegiatan DISPERINDAKOP dan UKM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Tahun 2015.

Sumber Lainnya

Subejo, SP, MSc, PhD. Seminar Akhir Tahun 2014 KKDSI. Daya saing indonesia dalam Mea: dari SDA, Manusia, hingga IPTEK. Yogyakarta, 13 Desember 2014, Ruang Seminar Perpustakaan UGM

 $\underline{http://nickyraulika.blogspot.com/2013/10/masyarakat-ekonomiasean.html}.$